

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rentang reformasi banyak bermunculan fenomena kasus sosial di masyarakat, mulai dari yang ringan, sedang hingga sampai yang berat, dalam bentuk tindak pelanggaran, perilaku menyimpang dan tindakan kriminalitas. Seperti seks bebas, korupsi, penggunaan narkoba, penyiksaan dengan kekerasan, terorisme, dan berbagai aktivitas yang menyimpang dan melanggar hukum lainnya. Terdapat beberapa norma-norma yang tidak berfungsi lagi atau bahkan hilang akibat arus globalisasi. Norma-norma tersebut sudah seharusnya diketahui dan dipahami untuk dimanifestasikan dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, kehidupan masyarakat mengalami disfungsi nilai-nilai.

Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, mendahulukan kepentingan umum, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dan pluralis, serta bersikap toleran dan bergotong-royong. Kini mulai cenderung berubah menjadi hagemoni-hagemoni kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua ini menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa ini, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, serta bergesernya nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketika, Orde Baru berakhir pada 1998, ideologi Pancasila seakan hilang bersama dengan berakhirnya pemerintahan presiden Soeharto, sepanjang kekuasaan orde baru, Pancasila hadir dalam setiap pidato kepala negara dan pejabat dibawahnya. Hal ini lantaran pemerintah pusat menjadikan dasar negara sebagai rujukan dan orientasi pembangunan segala bidang. Hampir tiada hari tanpa Pancasila. Pemerintahan orde baru melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam beragam program nasional penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pancasila digalakkan diberbagai tingkat pendidikan dan penataran dilakukan bagi pegawai pemerintah, profesi dan masyarakat.¹

Dalam era awal reformasi, Pancasila tidak lagi menjadi jargon pembangunan dan Pancasila untuk beberapa saat hilang dari sambutan elite bangsa, apalagi kalangan masyarakat. Reformasi telah melahirkan era baru bagi bangsa Indonesia. Demikian pun dengan Pancasila, lahirnya era reformasi seakan menyengat kesadaran warga bangsa bahwa selama ini pemerintahan orde baru telah melakukan manipulasi atas Pancasila. Kesadaran bahwa dibalik semaraknya program pendidikan dan penataran Pancasila, Negara ternyata pada saat yang sama berpindah jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumuskan oleh kalangan pendiri bangsa. Praktik pemerintahan yang sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme diakalangan orde baru menjadi senjata menikam tuannya sendiri. Segala kebaikan dan nilai historis Pancasila terurus oleh gerakan reformasi. Untuk sejenak Pancasila tidak lagi terdengar pada pidato kenegaraan pemerintah dan wacana politik nasional.²

¹ Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana Prenedia Group, 2012), hlm. 26.

² *Ibid.*, hlm. 27.

Mengiringi gerakan reformasi dan demokratisasi, hasil survei nasional bertajuk “Islam dan Kebangsaan” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada 2007 menunjukkan bahwa mayoritas responden 84,7% lebih mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila ketimbang beraspirasi menjadi negara Islam 22,8%.³ Hasil survei tersebut memperkuat survei yang dikerjakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2006; 69,6% masih mengidealkan sistem kenegaraan berdasar Pancasila. Pancasila 11,5% menginginkan seperti negara Islam dan hanya 3,5% menginginkan Indonesia seperti negara demokrasi Barat.⁴

Hanya berselang 4 tahun, sebuah survei yang diselenggarakan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada 2011 menunjukkan sebanyak 84,8% setuju diberlakukannya syariat Islam, sementara sebanyak 25,8% menganggap Pancasila tidak lagi relevan lagi sebagai dasar negara. Survei tersebut tidak hanya dilakukan oleh siswa madrasah melainkan 100 sekolah yang terdiri dari 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri. survei dilakukan selama Oktober 2010 hingga Januari 2011 di sepuluh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). sebanyak 993 siswa SMP dan SMA menjadi sampel penelitian, selain pada siswa survei juga dilakukan pada guru Pendidikan Agama Islam di SMP dan SMA. Hasilnya sebanyak 76,2% guru tersebut setuju pemberlakuan syariat Islam dan 21,1% menyatakan Pancasila sudah tidak relevan sebagai dasar Negara

³ Survei berlangsung Maret-April 2007 dengan jumlah responden 1.200 orang tersebar di semua provinsi. Berasal dari kota (42%) dan desa (58%), serta pria (50%) dan wanita (50%) berusia 17-60 tahun; lihat *Gatra*, 21 Mei 2007. dalam As’ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemashlahatan Bangsa*, (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 1.

⁴ Survei dilakukan di tiga puluh tiga provinsi pada 28 Juli – 3 Agustus 2006 dengan metode *multi-stage random sampling* dan wawancara tatap muka dengan *margin of error* 3,8%. Jumlah responden 700 orang; lihat *Suara Karya*, 25 Agustus 2006. As’ad Said Ali. *Ibid*, hlm. 1.

dari jumlah 590 guru Pendidikan Agama Islam yang menjadi sampel dari cakupan wilayah yang sama pada penelitian peserta didik. Kecenderungan ini akan terus meningkat seiring lemahnya pemahaman Pancasila di masyarakat umum.⁵

Hasil survei tersebut menunjukkan Indonesia belum aman dari ujian dan ancaman disintegrasi. Kemunculan gerakan-gerakan separatis, lepasnya Timor Timur dari genggaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari NKRI, disusul dengan ide serupa oleh Gerakan Papua Merdeka dan Gerakan separatis Maluku. konflik-konflik bernuansa primordial dan agama, konflik antar-etnis muncul di Kalimantan dan Lampung, disusul dengan konflik berdarah bernuansa agama di Tolikara Papua dan sejumlah daerah. Menyusul konflik-konflik ini, demokratisasi dan reformasi juga telah memunculkan kembali impian-impian politik masa lalu, Seringkali muncul gerakan-gerakan yang menginginkan pemberlakuan syariat islam sehingga wacana penggantian ideologi negara Pancasila dengan dasar agama, hal serupa di respons oleh kalangan lain dengan mewacanakan pemberlakuan ajaran agama di suatu kawasan bahkan ancaman pemisahan dari NKRI. Indonesia yang sedang belajar berjalan dengan demokrasi berhadapan dengan ancaman gerakan primordial yang serius.

Budaya bermusyawarah dan bermufakat yang bertujuan untuk kebaikan bersama seolah hilang tergantikan dengan mekanisme *Voting Instant* yang berorientasi kepada kepentingan mayoritas dan kalkulasi secara politik yang tergambar pada saat sidang Paripurna DPR era reformasi. Namun demikian,

⁵ Badan Intelijen Negara-Mewaspada Eksistensi Pancasila dalam www.bin.go.id/awas/detil/193/4/21/02/2013/mewaspada-eksistensi-Pancasila di akses pada tanggal 13 Desember 2015, pukul 13.00 WIB.

euphoria demokrasi telah mengubah secara signifikan Indonesia menjadi masyarakat yang terbuka dan kritis. Demokrasi telah menjadikan segala hal di masa lalu menjadi layak untuk dipertanyakan dan bahkan digugat. Terlalu kuatnya peran peran negara atas warga negara di masa lalu berdampak sangat kontras di masa reformasi, peran negara melemah. Pada saat yang sama masyarakat seperti kehilangan arah dan sistem demokrasi yang belum mereka alami pada masa sebelumnya, yakni demokrasi tanpa predikat pancasila yang dulu pernah disalahgunakan oleh penguasa Orde Baru.

Sejumlah langkah perbaikan menuju tata kehidupan berkebangsaan dan bernegara yang demokratis sudah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Sistem politik dengan pemilu yang semakin terbuka dengan kontestan banyak partai politik dan pembatasan jabatan presiden menjadi indikator demokrasi Indonesia yang penting. Keterbukaan politik, otonomi daerah, dekonsentrasi pembangunan, perserikatan pers dan kebebasan berserikat serta berkumpul, dan kebebasan beragama yang semakin semarak di era reformasi semakin menambah kualitas demokrasi Indonesia.

Mencermati gegap gempita reformasi sejumlah pandangan bermunculan tentang bagaimana memposisikan pansasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Hasil survei yang dilakukan *KOMPAS* dan dirilis pada 1 Juni 2008, justru memperlihatkan pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila merosot tajam; 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak bisa menyebutkan sila-sila Pancasila dengan benar dan lengkap; 42,7% responden berusia 30-45 tahun salah

menyebutkan sila-sila Pancasila dan responden yang berusia 46 tahun ke atas lebih parah yakni sebanyak 60,6% salah menyebutkan kelima Pancasila.⁶

Dinas Pendidikan Kota Depok melakukan survei kepada pelajar Depok dari tingkat SD hingga SMA terkait sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dari survei yang dilakukan lembaga survei pada 2012 di Depok dengan responden 100 siswa dari SD-SMA tercatat 70 persen pelajar Depok tidak hafal dasar negara Indonesia Pancasila.⁷

Menyadari situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini, MPR sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MPR telah merancang dan melaksanakan agenda pemantapan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara.⁸

MPR RI mengangkat bahan materi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Mengupayakan Pancasila untuk menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. dan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara

⁶ Survei dilakukan pada 28-29 Mei 2008 melalui telepon dengan 835 orang responden berusia 17 tahun lebih yang dipilih secara acak dari Buku Petunjuk Telepon Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Jayapura; lihat *KOMPAS*, 1 Juni 2008. As'ad Said Ali. *Ibid*, hlm. 2.

⁷ Marieska Harya Virdhani, *Astaga, 70% Pelajar di Depok Tak Hafal Pancasila*, <http://news.okezone.com/read/2013/05/27/560/813009/astaga-70-pelajar-di-depok-tak-hafal-pancasila>. di akses pada tanggal 13 Desember 2015, pukul 13.45 WIB.

⁸ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI Cetakan ke 5, 2015), hlm. xi.

sampai hari ini agar tetap kokoh menjadi landasan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MPR RI berperan dalam mengaktualisasikan kembali konsesus kebangsaan termasuk Pancasila, peletakan Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar, semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 4 April 2014 yang membatalkan penggunaan istilah Empat Pilar Kebangsaan. Seharusnya, MPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014 yang membatalkan frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait Pancasila pilar kebangsaan. Hingga kini MPR terus gencar mensosialisasikan 4 pilar ke berbagai pelosok nusantara. MPR menjadikan konsultasi antara Pimpinan MPR RI dan Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan Aswanto, pada 16 februari 2015 sebagai dasar

perubahan nama sosialisasi menjadi Empat Pilar Kebangsaan MPR-RI dan dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI.⁹

Meskipun mendapat banyak pertentangan keberadaan sosialisasi seperti ini masih dibutuhkan untuk membangun pemahaman, hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik yang berlangsung pada 27 – 29 Mei 2011. Dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan 12.056 responden di 181 Kabupaten dan Kota pada 33 provinsi di seluruh Indonesia. Responden terdiri dari pelajar, guru, dosen, pengusaha dan sebagainya. Menyatakan bahwa efektifitas pemahaman Pancasila melalui penataran/sosialisasi berkrontribusi sebanyak 13%, pemahaman Pancasila melalui perbuatan pejabat Negara sebanyak 19%, disamping Pendidikan sebesar 30%, ceramah keagamaan 10% dan publikasi di media massa sebanyak 2%.¹⁰

Namun dalam kenyataanya meskipun telah berubah nama kegiatan sosialisasi dan Pancasila mendapatkan penegasan, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi dalam sosialisasi tersebut, masih terdapat *gap* atau kesenjangan pada saat menerjemahkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjawab permasalahan dan isu yang timbul satu dekade belakangan ini. Pancasila dianggap sakral, teoritis dan tidak kontekstual, menimbulkan keengganan tersendiri untuk menemukan dan menggali relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Badan Sosialisasi MPR-RI mendapat tantangan besar untuk menerjemahkan ideologi Pancasila menjadi nilai-nilai praksis yang mampu menjawab permasalahan dan isu

⁹ Badan Sosialisasi MPR RI, *Op.Cit.*, hlm. xxiii.

¹⁰ Pidato Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono – peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2011 di Gedung Paripurna Kompleks MPR, DPR dan DPD Republik Indonesia. Dalam m.tribunnews.com/nasional/2011/06/01/survei-bps-7926-persen-masyarakat-mau-pancasila-dipertahankan, di akses pada tanggal 13 Desember 2015, pukul 14.00 WIB.

yang berkembang di masyarakat. Dengan menghilangkan *gap* tersebut Pancasila akan aktual dengan sendirinya menjadi perbincangan masyarakat sehari-hari. Dan dijadikan masyarakat pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana MPR RI mengaktualisasikan Pancasila melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Penulis akhirnya mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul: “Aktualisasi Pancasila melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI”.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana materi Pancasila dalam Empat Pilar MPR RI?
2. Bagaimanakah *personal branding* sebagai Aktualisator Pancasila yang dibangun melalui kualifikasi dan integritas Anggota MPR RI?
3. Bagaimanakah proses aktualisasi Pancasila yang diupayakan MPR RI?
4. Apakah ada penemuan-penemuan baru terkait Pancasila yang ditemukan pada saat kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI?

1.3. Pembatasan Masalah

Setelah dilakukan observasi awal, dan studi literatur mengenai materi-materi yang digunakan dalam sosialisasi empat pilar MPR RI. Sosialisasi empat pilar MPR RI bertujuan untuk memasyarakatkan konsep-konsep kebangsaan, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan *Bhinneka Tunggal Ika*. MPR RI berupaya mengaktualisasikan dalam ranah

substantif dan menerjemahkan segala nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam ranah aplikatif masyarakat dan mentransformasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menjadikan Pancasila aktual dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki negara dan mentransformasikannya dalam norma-norma yang jelas pada masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena keaktualisasiannya Pancasila dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi bidang pendidikan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, hukum, kehidupan beragama, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan berbagai bidang.

Berdasarkan pembatasan masalah untuk menyederhanakan dan memfokuskan penelitian ini hanya dibatasi pada masalah “Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam mengaktualisasikan Pancasila”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah MPR RI mengaktualisasikan Pancasila dalam ranah substansi dan praksis operasional melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dikaji dari sudut pandang Akademisi PPKN?

1.5. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan makna dan tujuan kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI yang meliputi berbagai kegiatan keorganisasian, diskusi publik, penyuluhan dan demonstrasi publik.
2. Menjelaskan konsep Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dan kaitannya dengan pemahaman paradigma pembangunan.
3. Mengungkapkan *personal branding* Anggota MPR RI sebagai Aktualisator Pancasila.
4. Meneguhkan keaktualan Pancasila sebagai Ideologi negara Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menemukan dan mengembangkan konsep ideologis Pancasila dalam menggali, membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan terciptanya masyarakat Indonesia baru yang mampu menjabarkan nilai-nilai pancasila yang universal kedalam norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Manfaat Praktis

- Memberikan kontribusi praktis, bagi peningkatan kualitas materi pada Badan Sosialisasi MPR RI.
- Mendorong adanya perubahan persepsi dan sikap masyarakat terkait Pancasila.

- Menggagas gagasan bagi warga negara Indonesia untuk memiliki *Sense of Making* atau rasa memiliki, menumbuhkan *Responsibility* atau tanggung jawab seluruh *stakeholders* dan kesediaan untuk menggali kembali Pancasila sebagai ideologi negara.